

**MANAJEMEN KONFLIK SENGKETA PETUANAN
ANTAR NEGERI PELAUW DAN KARIU TAHUN 2022
OLEH PEMERINTAH DAERAH MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu Komunikasi



Disusun Oleh :

CELIKHA ARTI OKTAVIANI

20.M1.0058

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

**MANAJEMEN KONFLIK SENGKETA PETUANAN
ANTAR NEGERI PELAUW DAN KARIU TAHUN 2022
OLEH PEMERINTAH DAERAH MALUKU TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata-1 dalam Ilmu Komunikasi



Disusun Oleh :

CELIKHA ARTI OKTAVIANI

20.M1.0058

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

**CONFLICT MANAGEMENT OF PETUANAN DISPUTES
BETWEEN NEGERI PELAUW AND KARIU IN 2022
BY THE CENTRAL MALUKU REGIONAL GOVERNMENT**

Celikha Arti Oktaviani

Soegijapranata Catholic University

Semarang

ABSTRACT

Negeri Pelauw and Kariu in Haruku Island Sub-district are two neighboring countries that need to maintain relations between each other in order to realize harmony and peace in accordance with the ideals of the Indonesian Nation. The harmony and peace between Negeri Pelauw and Kariu faded due to the petuanan dispute that occurred in 2022. In this regard, the Central Maluku Regional Government carried out conflict management in order to minimize the risk impact of the disputes that occurred. The purpose of this research is to find out the conflict management related to the petuanan dispute between Negeri Pelauw and Kariu carried out by the Central Maluku Regional Government. The approach in this research uses qualitative with data collection through interviews with key informants, literature study, and appropriate documentation according to the problem then analyzed descriptively analytically. The conflict management can be known by three conflict management processes, namely: 1) diagnosis resulting in the determination of the status of a social conflict disaster emergency and the formation of a social conflict handling team; 2) conciliatory intervention resulting in a Deed of Peace Agreement; and 3) evaluation resulting in Village Boundary Affirmation and social fund assistance. The results of this study conclude that the conflict management of the petuanan dispute between Negeri Pelauw and Kariu by the Central Maluku Regional Government is considered not to solve the root of the problem because the ownership of rights to the petuanan has not been clearly determined and the elements of the destruction of the Ashari Mahu traditional site, shooting, bombing, and burning of hundreds of Kariu residents' houses have not been thoroughly investigated by the police.

Keyword: conflict management, petuanan dispute, local government.

**MANAJEMEN KONFLIK SENGKETA PETUANAN ANTAR NEGERI
PELAUW DAN KARIU TAHUN 2022 OLEH PEMERINTAH DAERAH
MALUKU TENGAH**

Celikha Arti Oktaviani

**Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang**

ABSTRAK

Negeri Pelauw dan Kariu di Kecamatan Pulau Haruku merupakan dua negeri yang saling berdekatan sehingga perlu menjaga hubungan antar sesama yang bertujuan untuk mewujudkan kerukunan dan perdamaian sesuai cita-cita Bangsa Indonesia. Kerukunan dan perdamaian di antara Negeri Pelauw dan Kariu menjadi puda akibat sengketa petuanan yang terjadi pada tahun 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Maluku Tengah melakukan manajemen konflik supaya dapat meminimalisir dampak resiko dari perselisihan yang terjadi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen konflik terkait sengketa petuanan antar Negeri Pelauw dan Kariu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Maluku Tengah. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama informan kunci, studi pustaka, dan dokumentasi yang tepat sesuai permasalahan kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Manajemen konflik tersebut dapat diketahui dengan tiga proses manajemen konflik oleh Pemerintah Daerah Maluku Tengah, yakni 1) diagnosis menghasilkan penetapan status keadaan darurat bencana konflik sosial dan pembentukan tim penanganan konflik sosial; 2) intervensi secara konsiliasi menghasilkan Akta Kesepakatan Damai; dan 3) evaluasi yang menghasilkan Penegasan Batas Desa dan bantuan dana sosial. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen konflik sengketa petuanan antar Negeri Pelauw dan Kariu oleh Pemerintah Daerah Maluku Tengah dinilai tidak menyelesaikan akar permasalahan karena kepemilikan hak atas petuanan belum ditetapkan secara jelas dan oknum pengerusakan situs adat *Ashari Mahu*, penembakan, pengeboman, dan pembakaran ratusan rumah warga Kariu belum diusut tuntas oleh pihak kepolisian.

Kata kunci : manajemen konflik, sengketa petuanan, pemerintah daerah.